

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2018

**Banda Aceh, Jumat (24 Mei 2019)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue. Pemeriksaan terhadap LKPD TA 2018 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) TA 2018.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2018 ini diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, **Syafruddin Lubis, S.E., Ak. CA** kepada **Murniati, SE** selaku Ketua DPRK Simeulue, dan Bupati Simeulue, **Erli Hasim, SH., S.Ag., M.I.Kom.** Dalam pidatonya, Bapak **Syafruddin Lubis** menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang **kewajaran penyajian** laporan keuangan. Opini merupakan **pernyataan profesional pemeriksa** mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" laporan keuangan bukan merupakan "**jaminan**" tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyaknya terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue telah berhasil mempertahankan Opini WTP selama empat tahun berturut-turut sejak TA 2015. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut adalah Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan SPI antara lain: (1) Pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai; dan (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum sepenuhnya memadai. Temuan kepatuhan diantaranya terdapat: (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah pada lima Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) belum sesuai ketentuan; dan (2) Denda keterlambatan atas sepuluh paket pekerjaan pada tiga SKPK.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. BPK mempunyai keinginan yang kuat agar Pimpinan Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Subbagian Humas dan TU Kalan

Informasi lebih lanjut:  
Kautsar Aditya Wicaksana, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan  
Telp. 0651-32627  
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id